

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Sementara itu, bangsa Indonesia sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan dengan harapan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Namun pada kenyataannya, pembangunan pedesaan masih sangatlah kurang. Masih banyak pedesaan yang tertinggal dan belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa hingga 10 Desember 2018 mencatat bahwa masih ada 14.461 desa tertinggal di Indonesia. Angka tersebut setara 19,17% dari total desa di Indonesia yang berjumlah 75.436. Sementara itu, desa kategori berkembang ada sekitar 55.369 desa atau 73,4% dan desa mandiri ada sekitar 5.606 desa atau 7,43%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa daerah tertinggal di Indonesia hampir separuhnya masih tertinggal.

Pemerintah sangat mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subjek pembangunan. Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak 2015, triliunan rupiah telah dialokasikan untuk Dana Desa dan terus bertambah hingga kini tahun 2019 menjadi sebesar Rp 70 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2019). Aliran dana desa ini banyak yang kemudian digunakan untuk mendanai pendirian BUMDes. Hal ini dijelaskan dalam Permendes PDTT No.16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa pendirian, penguatan, hingga perluasan BUMDes merupakan salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu seiring dengan derasnya dana desa ke

daerah, jumlah BUMDes juga meledak dalam dalam tiga tahun terakhir. Pada Mei 2016 jumlah BUMDes berkembang pesat, yakni sebanyak 12.115 BUMDes, bertambah 12 kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 1.022 BUMDes (Kementerian Desa PDTT, 2018). Jumlah BUMDes terus bertambah lagi hingga menjadi 41.000 BUMDes per November 2018 di seluruh Indonesia (Kementerian Desa PDTT, 2018).

Desa Bojongkulur adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan merupakan 1 dari 100 “Desa Terbaik” se-Indonesia per 2018 dan berada pada urutan ke 66 dengan Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,8632 (Kementerian Desa PDTT, 2018). Desa Bojongkulur juga merupakan satu – satunya Desa di Kabupaten Bogor yang dikategorikan sebagai “Desa Mandiri” dari 174 desa se-Indonesia sejak 2014. Artinya, Desa Bojongkulur adalah 1 diantara 174 Desa Mandiri di Indonesia dari 73.709 desa merujuk pada hasil data Potensi Desa (PoDes) Tahun 2014 (Keputusan Kementerian Desa PDTT No. 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa).

Desa Bojongkulur pada tahun 2018 diketahui memiliki Pendapatan Desa sebesar Rp2.894.798.323, dimana dalam Pendapatan tersebut terdapat Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp688.850.000, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.226.639.221, dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp55.000.000,- (APBDes Desa Bojongkulur Tahun Anggaran 2018). Dalam jumlah PADes tersebut, terdapat Hasil Usaha Desa sebesar Rp84.000.000,- yang merupakan bagi hasil yang

disetorkan oleh BUMDes milik Desa Bojongkulur kepada Pemerintah Desa Bojongkulur.

Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDes BTM) adalah BUMDes milik Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Meskipun masih terbilang baru, BUMDes BTM sudah dikenal tidak hanya oleh desa – desa sekitar, akan tetapi dikenal juga oleh desa – desa lain di luar kota dan bahkan di luar pulau yang melakukan studi banding ke Desa Bojongkulur mengingat Desa Bojongkulur adalah salah satu Desa Terbaik se-Indonesia. BUMDes BTM hingga kini memiliki 2 (dua) unit usaha yaitu Unit Usaha Pasar dan Unit Usaha Grosir. Kini, BUMDes BTM diketahui tengah dalam proses untuk menambah unit usaha baru lagi. Adapun omset atau pendapatan BUMDes BTM dalam Laporan Laba Rugi per Desember 2018 tercatat telah mencapai Rp.832.869.000. Sedangkan kontribusi atau bagi hasil dari BUMDes BTM kepada PADes Desa Bojongkulur diketahui mencapai Rp.84.000.000,- pada tahun 2018.

Hardijono et al (2014) mengatakan bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga desa mampu melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih optimal. Sedangkan Budiono (2015) mengatakan bahwa BUMDes memiliki peranan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes maka akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 dan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan seberapa besar peran BUMDes pada Pendapatan Asli Desa di salah satu desa yang berlokasi di Kabupaten Bogor, tepatnya Desa Bojongkulur. Oleh karena itu penulis menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah Karya Ilmiah yang berjudul **“Analisis Pendapatan Asli Desa Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Bojongkulur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor sebelum dan sesudah adanya BUMDes?
2. Bagaimana keberhasilan Desa Bojongkulur dalam kesejahteraan masyarakatnya dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat Desa Bojongkulur atas pelayanan dan pengembangan desa dalam pemanfaatan fasilitas umum?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Membandingkan bagaimana Pendapatan Asli Desa pada Desa Bojongkulur sebelum dan sesudah adanya BUMDes;
- b. Menganalisis seberapa besar kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa pada Desa Bojongkulur;
- c. Mendeskripsikan bagaimana kontribusi PADes pada Desa Bojongkulur dalam kesejahteraan masyarakat desa.

### b. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan pemikiran baru dan memperkaya wawasan mengenai BUMDes serta menjadi acuan dalam pembenahan – pembenahan yang perlu dilakukan oleh Desa Bojongkulur dalam memperkuat BUMDes yang dimiliki dan menyejahterakan masyarakat desa.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam hal yang menyangkut

perkembangan hingga kontribusi BUMDes pada Pendapatan Asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa;

- 2) Bagi BUMDes BTM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan acuan dalam mengelola usahanya agar menjadi lebih baik kedepannya;
- 3) Bagi Desa Bojongkulur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pembenahan diri dalam memperkuat dan mendukung BUMDes yang dimiliki serta menyejahterakan masyarakat desa.